

ASPEK HUKUM PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA SWASTA

Yelsha Pradina F Simangunsong
NIM : 00000018118

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 terhadap Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). BUMS selaku mitra dari BUMN juga diharapkan dapat menjadi tonggak bangkitnya perekonomian bangsa Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab peranan pemerintah dalam menjaga serta melindungi Badan Usaha Milik Swasta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk kedalam penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari, membaca, mencatat buku-buku, dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Analisis data menggunakan teknik analisis yang dilakukan dengan mengkaji isi suatu data sekunder yang merupakan suatu informasi yang dipahami maksudnya dengan perspektif yang sesuai perumusan masalah.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini ialah penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dinilai mampu dalam membantu Badan Usaha Milik Swasta berkembang dan menjadi mitra bagi BUMN dalam rangka memajukan perekonomian Indonesia serta peran Pemerintah dinilai baik dalam mengarahkan serta menjaga para pelaku usaha untuk terus berkembang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengganti tiga undang-undang sebelumnya yaitu *indonesische Berdrijvenwet* (Stb. Nomor 419) Tahun 1927) sebagaimana telah beberapa kali di ubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955, Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha Negara menjadi undang-undang. Peran Pemerintah menjadi sarana bagi masyarakat untuk membantu mengembangkan usaha swasta dan mampu mandiri dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha UMKM dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluasluasnya. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan dengan usaha mikro, kecil, menengah serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Perekonomian Indonesia, Pemerintah Indonesia.

ASPEK HUKUM PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA SWASTA

Yelsha Pradina F Simangunsong

NIM: 00000018118

ABSTRACT

This study aims to understand and explore the application of Law No. 19 of 2003 on Private Owned Enterprises (BUMS). BUMS as a partner of BUMN is also expected to be a milestone in the rise of the Indonesian economy. This research is expected to answer the government's role in maintaining and protecting private-owned enterprises.

This research is a descriptive research and when viewed from the point of view, it is included in normative or doctrinal juridical legal research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques are carried out by literature studies, namely studying, reading, recording books, documents, literature, laws and regulations and others. Data analysis uses analytical techniques that are carried out by examining the content of secondary data which is information that is understood by means of an appropriate perspective on the formulation of the problem.

The results achieved in this study are the application of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises is considered capable of helping Private-Owned Enterprises develop and become partners for SOEs in order to advance the Indonesian economy and the role of the Government is considered good in directing and maintaining the perpetrators. efforts to continue to grow.

Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises replaces the previous three laws, namely Indonesia Berdrijvenwet (Stb. Number 419) of 1927) as has been amended several times and lastly added by Law Number 12 of 1955, Law No. Law No. 19 Prp/1960 concerning State Enterprises, and Law No. 9/1969, concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1/1969 concerning State forms of business into law. The role of the government is to become a means for the community to help develop private businesses and be able to be independent in running their businesses. In this case, the Government conducts guidance and development of MSME and cooperative businesses through partnership programs, increasing competitiveness, providing encouragement for innovation and market expansion, as well as disseminating information as widely as possible. The government is obliged to determine the business fields that are reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives as well as business fields that are open to large businesses on condition that they must cooperate with micro, small, medium enterprises and cooperate with business entities appointed by the Government.

Keywords: Private Owned Enterprises (BUMS), State Owned Enterprises (BUMN), Law Number 19 Year 2003, Indonesian Economy, Government of Indonesia.